



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 – 2029



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumberdaya Daya Perangkat Daerah	11
2.1.2.1 Sumberdaya Aparatur.....	11
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana.....	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan.....	17
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	18
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.2.2. Isu Strategis Dinas Pertanian.....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan	21
3.2. Sasaran.....	22
3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah	23
3.4 Arah Kebijakan	23
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	25
4.2. Program Pendukung Prioritas.....	49
4.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	50
4.4 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	51
PENUTUP.....	53

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap OPD wajib menyusun wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan pasal 272 UU 23 Tahun 2014 Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra OPD akan menjadi pedoman OPD saat menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian yang telah

ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan Renja Dinas Pertanian yang merupakan perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 64 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 memiliki karakteristik sebagai berikut: pertama lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isi-isu strategis dengan sasaran yang dinamis; kedua memberikan arah pembangunan dan ketiga lebih berorientasi pada tindakan antisipatif. Sebagai dokumen perencanaan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai arahan strategis pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah sesuai visi misi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya tujuan disusunnya Resntra Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati, dalam rangka mewujudkan pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Purbalingga.
2. Memberikan arah pembangunan pertanian di Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagai acuan bagi para pelaku pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan;

3. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan;
4. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (Lima) bab :

BAB I Pendahuluan

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini memberikan gambaran pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, permasalahan pelayanan perngkat daerah dan isu strategis

BAB III Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menggambarkan tentang rumusan yang dicapai OPD dalam jangka menengah yang diturunkan dari misi OPD, dijabarkan dalam tujuan dalam bentuk hasil yang lebih spesifik. Strategi merupakan pendekatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan arah kebijakan berisi panduan operasional untuk melaksanakan strategi.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja yang merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan.

Indikator kinerja merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur.

BAB V Penutup

Bab ini memberikan pernyataan akhir atas keseluruhan isi dokumen serta menekankan komitmen OPD dalam melaksanakan rencana yang telah disusun.

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, maka Dinas Pertanian mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:
 - a. Sub Urusan Sarana Pertanian, yaitu:
 1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam daerah;
 3. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
 4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 5. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah;
 6. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain;
 - b. Sub Urusan Prasarana Pertanian, yaitu:
 1. Pengembangan prasarana pertanian;
 2. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
 3. Pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - c. Sub Urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yaitu:
 1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
 2. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
 3. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner dalam Daerah;

4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dalam Daerah;
 5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- d. Sub Urusan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, yaitu pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah;
- e. Sub Urusan Perizinan Usaha Pertanian, yaitu:

1. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
2. Penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan dan rumah potong hewan;
3. Penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

f. Sub Urusan Penyuluhan, yaitu:

1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
3. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
4. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; dan
5. Pembentukan badan usaha milik petani.

2. Selain mempunyai tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertanian juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Pertanian meliputi bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Perlindungan Pertanian, dan Pengembangan SDM Pertanian dan Bina Usaha;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pertanian meliputi bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Perlindungan Pertanian, dan Pengembangan SDM Pertanian dan Bina Usaha;

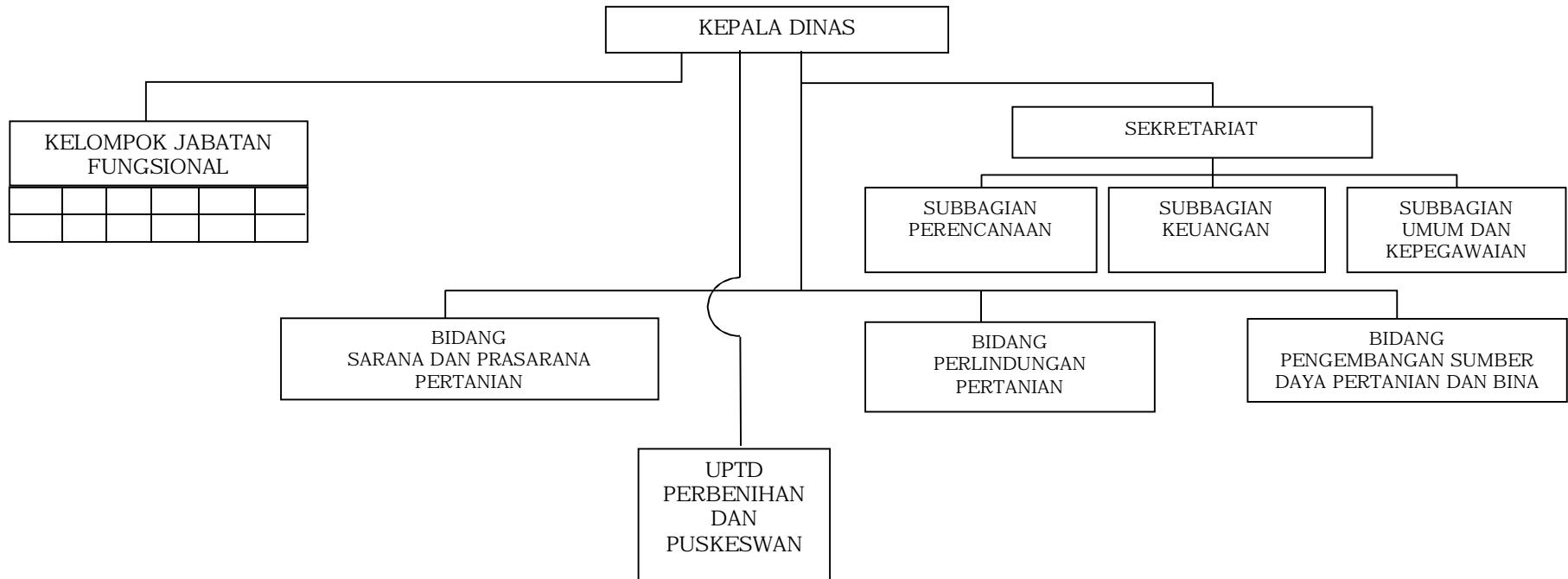
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian meliputi bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Perlindungan Pertanian, dan Pengembangan SDM Pertanian dan Bina Usaha;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian meliputi bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Perlindungan Pertanian, dan Pengembangan SDM Pertanian dan Bina Usaha;
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan DINPERTAN;
6. Pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikana oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 64 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :
Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 2 (dua) Kepala UPTD dan 18 BPP.

Adapun perincian Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, dan UPTD adalah sebagai berikut :

- Sekretariat dengan 3 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.
- Bidang Perlindungan Pertanian
- Bidang Pengembangan Sumberdaya Pertanian dan Bina Usaha
- 2 UPTD yaitu UPTD Perbenihan dan UPTD Kesehatan Hewan
- 18 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan.
- Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA



2.1.2 Sumberdaya Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumberdaya Aparatur

Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, 84 orang, Status Kepegawaian, 63 Orang PNS dan 19 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta di Dukung PNS Provinsi Jawa Tengah yang bertugas di Kabupaten Purbalingga selaku Petugas Pengamat Hama (PHP) 14 orang dan 4 orang petugas perkebunan adapun perinciannya sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah PNS, CPNS dan PTT Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		PNS	CPNS	PTT	PNS Dpb		
1	SD	1	-	5		6	7,4
2	SMP	2	-	4		6	7,4
3	SMA	14	1	3		18	22,0
4	D3	12	-	-		12	14,7
5	S1	29	5	1		35	42,7
6	S2	5	-	-		5	6,1
	Jumlah	63	6	13		82	100,0

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

Tabel 1.2
Pegawai Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2025

No	Golongan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	PNS		
1	Gol I	1	-	1	1	1,5
2	Gol II	13	1	14	20,3	
3	Gol III	44	5	49	71,1	
4	Gol IV	5	-	5	7,3	
	Jumlah	63	6	69	100,0	

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat golongan III sebanyak 71,1 %, sedangkan yang terkecil yaitu golongan I sebesar 1,5%.

Tabel 1.3
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2025

No	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	3
4	IV	16
	Jumlah	20

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

Tabel 1.4
Data Pegawai Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Esselon
Tahun 2025

No	Tingkat Esselon	Jumlah
1	II a	-
2	II b	1
3	III a	1
4	III b	3
5	IV a	14
6	IV b	2
	Jumlah	21

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Aset yang di kelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga meliputi tanah/kebun, gedung/kantor dan sarana prasarana kantor yang meliputi, 65 Jenis barang

Tabel 1.6
Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jenis,
Jumlah dan Kondisi Tahun 2025

No	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	Gedung	12	8	4	-
2	Kendaraan Roda 4	6	4	1	1
3	Kendaraan Roda 2	53	25	28	-
4	Komputer	24	12	12	-
5	Laptop	8	4	-	4
6	Printer	23	12	11	-
7	Handycam	1	-	-	-

8	Camera Digital	4	4	-	-
9	Kursi Lipat	150	130	20	-
10	Kursi Tamu/Meja Tamu	7	7	-	-
11	Kursi Kayu	64	30	34	-
12	Kursi Putar	25	12	13	-
13	Meja Tulis	6	6	-	-
14	Meja Komputer	15	-	15	-
15	Meja Telephone	1	1	-	-
16	Meja Tamabahan	-	-	-	-
17	Meja Rapat Pim.	-	-	-	-
19	Meja Rapat	42	42	-	-
20	Filing Kabinet	30	22	18	-
21	Rak Buku	3	3	-	-
22	Telephone	1	1	-	-
23	Telephone Lokal	14	14	-	-
24	Lemari	62	26	36	-
25	Rak Besi	-	-	-	-
26	Kursi Rapat	189	189	-	-
27	Lemari Es	3	3	-	-
28	VCD	7	7	-	-
29	TV	14	9	5	-
30	Mesin Pompa Air	4	4	-	-
31	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
32	Peti Uang	3	3	-	-
33	Vacum Cleaner	-	-	-	-
34	White Board Electric	-	-	-	-
35	Mesin Tik Manual	17	-	17	-
36	White Board	7	7	-	-
37	OHP	9	-	9	-
38	Wireless	8	-	8	-
39	Mesin Tik Electric	-	-	-	-
40	Plotter	-	-	-	-
41	Radio	5	-	5	-
42	Podium	-	-	-	-
43	Stabilizer	-	-	-	-
44	AC	4	4	-	-
45	Lemari Data	10	7	3	-
46	Jam Dinding	-	-	-	-
47	Rak Arsip	5	5	-	-
48	Screen	-	-	-	-
49	Peta	2	2	-	-
50	Kipas Angin	1	1	-	-
51	Foto Presiden/ Wakil	1	1	-	-
52	Lambang Garuda	1	1	-	-
53	Dispenser	1	1	-	-
54	UPS	-	-	-	-
55	Scanner	-	-	-	-
56	Projector	1	1	-	-
57	Faximile	1	1	-	-
58	Sound System	-	-	-	-
59	Voice Recorder	-	-	-	-
60	Finger Print	-	-	-	-

61	Fasilitas Internet	1	-	-	-
62	GPS	4	4	-	-
63	Altimeter	-	-	-	-
64	Telekompreen	-	-	-	-
65	Komputer Tablet	1	1	-	-

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Dinas Pada Dokumen Renstra Dinas Pertanian Tahun 2020–2024

NO	Indikator Kinerja	SATUAN	TARGET						REALISASI				%					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	NTP Sektor Pertanian	Nilai	103,37	103,83				N/A	N/A				N/A	N/A				
2	NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	Nilai	102,1	102,61				N/A	N/A				N/A	N/A				
3	NTP Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Nilai	108,44	109,09				N/A	N/A				N/A	N/A				
4	NTP Sub Sektor Perkebunan	Nilai	102,97	103,6				N/A	N/A				N/A	N/A				
5	NTP Sub Sektor Peternakan	Nilai	103,38	103,89				N/A	N/A				N/A	N/A				
6	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah			2.716.657.082.000	2.741.168.897.550	3.493.577.855.000			2.742.833.693.000	3.490.087.767.675	3.522.750.475.282			102,60	127,23	100,84	
7	Nilai PDRB Sektor Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rupiah				6.805.998.000.000	7.197.900.000.000				7.197.885.240.000	7.587.800.000.000				105,76	105,41	
8	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai				71,37	72,15				72,11	72,16				101,04	100,01	

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja Dinas Pertanian selama periode 2020-2024. Realisasi dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

- Tahun 2020-2021 dengan target indikator kinerja yaitu NTP sektor pertanian, NTP sub tanaman pangan, NTP sub sektor tanaman hortikultura, NTP sub sektor tanaman perkebunan dan NTP sub sektor peternakan, dikarenakan BPS tidak merealease nilai NTP tersebut menyebabkan realisasi tidak bisa diukur.
- Tahun 2022 target indikator kinerja nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan tercapai dengan realisasi 102,60 %
- Tahun 2023 dengan indikator kinerja PDRB sektor pertanian tercapai realisasi sebesar 105,76%, nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan 127,23%, dan nilai SAKIP 101,04%.
- Tahun 2024 dengan indikator kinerja PDRB sektor pertanian tercapai realisasi sebesar 105,41%, nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan 100,84%, dan nilai SAKIP 100,01%.
- Nilai PDRB sektor pertanian tahun 2024 sebesar Rp. 7.587.800.000.000 apabila dibandingkan dengan nilai PDRB sektor pertanian tahun 2023 sebesar Rp. 7.197.885.240.000 terdapat peningkatan nilai PDRB sektor pertanian yang signifikan yaitu sebesar Rp. 389.914.760.000 atau 5,14%.
- Nilai produksi pertanian Tahun 2024 sebesar Rp. 3.522.750.475.282 apabila dibandingkan dengan nilai produksi pertanian tahun 2023 sebesar Rp. 3.490.087.767.675 terdapat peningkatan sebesar Rp. 32.662.707.607 atau sekitar 0,94%.
- Nilai SAKIP Dinas Pertanian pada Tahun 2023 sebesar 72,11, sedangkan tahun 2024 sebesar 72,16, maka pada tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 0,07%

Realisasi Serapan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pendapatan	531.000. 000	540.375. 000	542.565. 000	545.949. 000	545.949. 000	540.565. 000	540.807. 500	542.598. 000	541.100. 000	241.958. 500	101,80	100,08	100,01	82,63	44,32
2. Belanja Langsung	21.893.2 56.000	40.444.6 00.300	50.976.9 47.000	39.162.0 87.000	44.939.1 99.000	21.441.8 88.982	34.809.1 45.439	48.815.6 35.525	37.672.3 55.255	43.401.2 78.983	97,94	86,07	95,76	96,20	96,58

Dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan ke Dinas Pertanian dari tahun 2020-2024 yaitu mengalami banyak penurunan, tahun 2020 tercapai 101,80 %, tahun 2021 menurun menjadi 100,08%, menurun menjadi 100,01% ditahun 2022, menurun lagi menjadi 82,63% ditahun 2023, tahun 2024 menurun menjadi 44,32%, hal ini disebabkan oleh karena adanya bencana pertanian yaitu berupa banjir kekeringan serangan hama dan penyakit.

Realisasi serapan anggaran dari tahun 2020-2024, tahun 2020 sebesar 97,94 %, mengalami penurunan ditahun 2021 yaitu 86,07% dari tahun 2022 terus mengalami hingga mencapai 96,58 ditahun 2024 hal ini menunjukan perencanaan program/kegiatan telah dilakukan dengan baik. Target fisik dan keuangan sudah sinkron.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Secara umum, kelompok sasaran dinas ini sangat beragam, mencakup semua pihak yang terlibat dalam sektor pertanian dan peternakan, dari hulu ke hilir.

- Petani

Merupakan individu yang memiliki usaha atau pekerjaan dibidang pertanian baik itu komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- Peternak

Merupakan pembudidaya atau pemelihara hewan ternak dengan tujuan untuk diambil hasil dan manfaatnya, seperti daging, susu, telur, atau untuk dikembangbiakkan sebagai bibit.
- Kelompok Tani/ Kelompok Peternak

kumpulan dari beberapa petani atau peternak yang bergabung secara sukarela dalam satu wilayah (seperti dusun atau desa) untuk saling bekerja sama, belajar, dan berusaha bersama dalam mengelola usaha taninya.

- Gapoktan (gabungan kelompok Tani)

Kumpulan dari beberapa Kelompok Tani yang bergabung untuk membentuk suatu wadah kerjasama yang lebih besar. Jika Kelompok Tani (Poktan) ada di tingkat dusun, maka Gapoktan biasanya ada di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi, sehingga daya saing petani semakin kuat.

- Pelaku Usaha Pertanian

Pelaku Usaha Pertanian adalah semua pihak, baik perorangan maupun organisasi, yang terlibat dalam suatu kegiatan usaha di sektor pertanian, mulai dari menyediakan input, memproduksi, mengolah, hingga memasarkan hasil pertanian.

- Pelaku Usaha Pengolahan Pertanian

Perorangan atau perusahaan yang kegiatannya mengubah hasil pertanian dan peternakan mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual, nilai tambah, dan daya simpan yang lebih tinggi

- Pelaku Usaha Pemasaran dan Distribusi Pertanian

pihak yang berperan dalam menyalurkan produk pertanian (baik segar maupun olahan) dari produsen (petani/pengolah) hingga sampai ke tangan konsumen akhir

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

Tantangan pembangunan pertanian yang paling nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan beragam; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di

perdesaan; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus. Hal-hal tersebut diatas berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan Pertanian 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka pembangunan Pertanian di Kabupaten Purbalingga 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029 diperlukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hasil dari indentifikasi masalah tersebut, adalah sebagai berikut :

- Alih fungsi lahan pertanian produktif ke non-pertanian (pemukiman, industri) yang tinggi.
- Degradasi kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang tidak berimbang dan erosi.
- Rantai pasok yang panjang dan adanya tengkulak, menyebabkan harga di tingkat petani tidak stabil.
- Minimnya penerapan teknologi modern (mekanisasi, IoT) dan ketergantungan pada cara-cara tradisional.
- Regenerasi petani yang rendah karena minimnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

2.2.2. Isu Strategis Dinas Pertanian

Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal permasalahan pembangunan pertanian dan perkebunan yang dihadapi selama ini, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan yaitu:

Tabel 2.1. Isu Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2030

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian	Permasalahan Dinas Pertanian	Isu KLHS yang relevan dengan Dinas Pertanian	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Dinas Pertanian			Isu Strategis Dinas Pertanian
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> Lahan subur dan iklim yang mendukung untuk budidaya tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) dan hortikultura. Ketersediaan sumber air irigasi yang memadai dari sungai Adanya kelompok tani dan penyuluh pertanian yang aktif. Kedekatan pusat-pusat pemasaran dan konsumen (pasar tradisional & modern). Adanya varietas lokal unggul yang adaptif dengan kondisi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Alih fungsi lahan pertanian produktif ke non-pertanian (pemukiman, industri) yang tinggi. Degradasi kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang tidak berimbang dan erosi. Rantai pasok yang panjang dan adanya tengkulak, menyebabkan harga di tingkat petani tidak stabil. Minimnya penerapan teknologi modern (mekanisasi, IoT) dan ketergantungan pada cara-cara tradisional. Regenerasi petani yang rendah karena minimnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan kualitas dan kuantitas lahan pertanian beriringi akibat alih fungsi dan degradasi. Pencemaran air tanah dan permukaan akibat residu pupuk dan pestisida dari aktivitas pertanian. Konversi kawasan hutan dan lahan berlereng untuk pertanian yang memicu bencana alam (longsor). Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari lahan gambut yang dikeringkan dan penggunaan pupuk nitrogen. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem (kekeringan, banjir) yang mengancam pola tanam dan produktivitas. Kompetisi penggunaan air untuk pertanian, industri, dan domestik yang semakin ketat. Tekanan global untuk menerapkan praktik pertanian yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Ketidakstabilan harga komoditas pertanian di pasar global mempengaruhi insentif bertani. Gangguan pada rantai pasok global (akibat pandemi, perang) yang menyadarkan pentingnya ketahanan pangan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Tekanan untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri dan mengurangi impor. Keterbatasan kuota dan penyaluran yang tidak tepat sasaran menghambat produktivitas. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk pertanian organik dan bebas residu kimia. Dorongan untuk mengadopsi teknologi digital (smart farming) dalam efisiensi produksi. Instruksi dan regulasi pusat untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Persaingan dengan produk pertanian dari daerah lain yang lebih murah atau berkualitas. Penyebaran hama dan penyakit tanaman yang mudah menyebar antardaerah. Perkembangan wilayah perumahan dan industri yang menciptakan peluang pasar namun juga ancaman alih fungsi lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan dan Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjamin ketersediaan lahan. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan. Pengembangan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan (organik) untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Penguatan kelembagaan petani dan modernisasi sistem usaha tani melalui mekanisasi dan digitalisasi. Pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian melalui pengolahan hasil (agroindustri) dan pemasaran digital.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun Visi Bupati Terpilih dimaksud adalah “**AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA**”.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks rencana pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi misi daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut diterjemahkan dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sebagaimana diketahui misi daerah kabupaten Purbalingga sesuai RPJMD Kabupaten Purbalingga yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Pertanian yaitu pada Misi ke 1 yaitu **Bangkitkan Ekonomi Rakyat**”.

Tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dari Misi ke-1 adalah Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata. Sejalan dengan tujuan RPJMD tersebut yang dapat didukung pencapaiannya sesuai tugas dan fungsi OPD di bidang pertanian maka Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga mempunyai tujuan “**Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah**”

Untuk mencapai tujuan utama tersebut, Renstra Dinas Pertanian biasanya memiliki beberapa tujuan strategis yang lebih rinci, yaitu :

1. Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai untuk kegiatan pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian, dengan menciptakan petani dan pelaku usaha pertanian yang profesional, melek teknologi, dan inovatif.
3. Mengembangkan agribisnis dan agroindustri, dengan transformasi pertanian dari sekadar produksi primer ke sistem yang mencakup pengolahan, distribusi, dan

pemasaran untuk menambah nilai ekonomi.

4. Meningkatkan daya saing produk pertanian, dengan membuat produk pertanian dalam negeri mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.
5. Mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, bahwa pembangunan pertanian tidak merusak lingkungan untuk generasi mendatang.
6. Memperkuat kelembagaan petani, dengan mendorong petani untuk berkelompok dan berjejaring agar lebih kuat secara ekonomi dan sosial.

3.2. Sasaran

Sasaran pembangunan pertanian yang akan dicapai selama periode tahun 2025-2029 adalah “**Meningkatnya produksi pertanian.**“

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perlu dikemukakan indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Ket.
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Target 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya perekonomian yang maju dan inklusif	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah		PDRB Sub Sektor Pertanian	Miliar Rupiah	8.105,637	8.661,756	8.935,654	9.491,773	9.765,671	10.321,790	
		Meningkatnya produksi pertanian	Nilai Produksi Pertanian	Miliar Rupiah	7.974,46	8.525,74	8.792,49	9.344,34	9.616,24	10.168,43	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Angka	72,26	72,27	72,29	72,31	72,33	72,35	

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Nilai strategis Renstra adalah merupakan pedoman arah dan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan organisasi dalam lima tahun. Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian berupa penahapan Rentsra Dinas Pertanian

Tabel 3.4. Penahapan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fase Akselerasi Dasar <ul style="list-style-type: none"> Perluasan program percontohan, rehabilitasi infrastruktur dasar, dan penguatan kapasitas. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier prioritas. Pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani prioritas. Ekspansi percontohan organik Penggunaan platform marketplace produk pertanian daerah. Sekolah lapang iklim untuk antisipasi cuaca ekstrem. 	Fase Transformasi Teknologi <ul style="list-style-type: none"> Introduksi teknologi, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan menuju praktik pertanian modern. Subsidi dan demo alsintan (traktor kecil, pompa air). Pengembangan pupuk kandang dan pestisida hayati terpadu. Pelatihan pemasaran digital untuk poktan. Pembentukan kelompok petani milenial. 	Fase Intensifikasi <ul style="list-style-type: none"> Ekspansi masif program unggulan, pengolahan hasil, dan pemasaran. Ekspansi alsintan untuk custom hiring. Pengembangan produk olahan unggulan Pembentukan kemitraan dengan offtaker (perusahaan, retail). Sertifikasi HALAL untuk produk olahan. 	Fase Pemantapan <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi seluruh program, peningkatan efisiensi, dan penyiaian akhir. Optimalisasi penggunaan alsintan dan teknologi. Penguatan modal kerja untuk koperasi petani. Branding dan promosi produk unggulan di tingkat nasional. 	Fase Mandiri dan Keberlanjutan <ul style="list-style-type: none"> Kemandirian petani, keberlanjutan sistem, dan replikasi keberhasilan. Koperasi petani mengelola usaha dari hulu ke hilir. Pertanian presisi (precision farming) diterapkan di sentra produksi.

3.4 Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian dan perkebunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Purbalingga guna mewujudkan **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**

Tabel 3.5. Arah Kebijakan Dinas Pertanian Tahun 2025-2030

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian	Ket
<ul style="list-style-type: none"> UU No. 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Permentan No. 40/2019 tentang Pedoman Umum Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan. Melindungi dan mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian lokal. Mendorong penerapan inovasi dan teknologi tepat guna di sektor pertanian. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui intensifikasi yang ramah lingkungan, penggunaan benih unggul, dan optimalisasi lahan. Melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi melalui pemetaan, penetapan, dan penegakan hukum atas LP2B, serta mendorong konsolidasi lahan. Mendorong adopsi teknologi pertanian presisi (precision farming), mekanisasi (alsintan), dan digitalisasi untuk efisiensi usaha tani. Memperpendek rantai distribusi dan pemasaran hasil pertanian melalui pengembangan pasar digital, kemitraan usaha, dan penguatan kelembagaan petani (Koperasi). Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan petani melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian yang berkelanjutan. Menerapkan sistem budidaya pertanian yang adaptif dan mitigatif terhadap perubahan iklim serta ramah lingkungan (organik) untuk menjamin keberlanjutan. 	

BAB IV.

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Rencana program untuk tahun 2025–2029 kedepan penyusunan program pembangunan pertanian Kabupaten Purbalingga, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga mencakup bidang pertanian dengan 6 (enam) program antara lain :

- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Program penyuluhan pertanian

Dalam rangka mengoptimalkan program-program tersebut diatas tentu kegiatan-kegiatannya tetap sebagai kelanjutan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit-unit usaha yang difokuskan dengan mengakomodir icon-icon sebagai produk unggulan dibidang pertanian.

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian

Tahun 2025 -2030

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya perekonomian yang maju dan inklusif	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah	Meningkatnya produksi pertanian			PDRB Sektor Pertanian		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian			Nilai Produksi Pertanian		
		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Dinas Pertanian		
		Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah			Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah			Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan		
					Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang		
					Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang		
					Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

				<i>Terpenuhinya layanan administrasi umum</i>	<i>Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum</i>	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				<i>Terpenuhinya sarana prasarana kerja</i>	<i>Persentase laporan pemenuhan pengadaan barang</i>	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				<i>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang</i>	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			<i>Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah</i>	<i>Persentase pemanfaatan pemeliharaan BMD</i>	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pemanfaatan sarana pertanian		Persentase pemanfaatan sarana pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		<i>Meningkatnya penggunaan sarana pertanian sesuai ketentuan</i>		<i>Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai ketentuan</i>	<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	
				<i>Persentase benih padi yang diedarkan</i>		
			Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai	

			Teknologi dan Spesifik Lokasi	dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Terawasinya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan sarana pendukung pertanian	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			Termenfaatkannya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tumbuhan	Persentase penggunaan bibit unggul	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Termenfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			Terlaksannya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase benih yang diedarkan	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
		Optimalnya pemanfaatan luas lahan pertanian		Persentase Luas Lahan Pertanian yang Diolah/ Dimanfaatkan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang difasilitasi pengembangannya	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Persentase luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	

			Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
			Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
			<i>Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian</i>	<i>Persentase Jalan Usata Tani (JUT) sesuai standar</i>	<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	
				<i>Persentase pemenuhan standar RPH</i>		
				<i>Persentase luasan oncoran lahan pertanian</i>		
				<i>Persentase prasarana BPP sesuai standar</i>		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	

				terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
				<i>Terlaksananya fasilitasi wilayah sumber bibit ternak</i>	<i>Persentase wilayah ternak yang difasilitasi</i>	<i>Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
				Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Menurunnya kejadian penyakit hewan dan meningkatnya higienitas Pangan Asal Hewan (PAH)		Persentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				<i>Terlaksananya pengobatan massal ternak</i>	<i>Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM)</i>	<i>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				<i>Terlaksananya pelayanan jasa Medik Veteriner</i>	<i>Persentase Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai standar</i>	<i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	

				<i>Terlaksananya pemantauan/pemeriksaan Pangan Asal Hewan (PAH)</i>	<i>Jumlah daging yang tidak ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)</i>	<i>Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	
				Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
Meningkatnya penanggulangan bencana pertanian					Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				<i>Terlaksananya fasilitasi penanggulangan bencana pertanian</i>	<i>Luas lahan pertanian yang mendapat fasilitasi penanggulangan bencana</i>	<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
Meningkatnya kualitas kelompok tani					Persentase Kelompok Tani (Kategori Madya dan Utama)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				<i>Terlaksananya penyuluhan kepada kelompok tani</i>	<i>Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan</i>	<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	

				Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tahun 2026 – 2030

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	25.828.890 .000	100	27.120.335 .000	100	28.476.351 .000	100	29.900.169 .000	100	31.395.177. 000	100	25.828.890.000
		Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Percentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100		100		100		100		100		100	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	Percentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100		100		100		100		100		100	
			Percentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	Persen	100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Percentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	persen	100	2.600.000	100	2.600.000	100	2.600.000	100	2.600.000	100	2.600.000	100	2.600.000

	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.250.000	2	1.250.000	2	1.250.000	2	1.250.000	2	1.250.000	2	1.250.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1.350.000	4	1.350.000	4	1.350.000	4	1.350.000	4	1.350.000	4	1.350.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Per센	100	24.120.335 .000	100	24.876.554 .000	100	25.917.399 .000	100	27.273.415 .000	100	28.697.233. 000	100	30.192.2 41.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Orang/bulan)	220	24.791.731 .000	50	24.797.731 .000	50	25.838.576 .000	50	27.194.592 .000	50	28.618.410. 000	50	30.113.4 18.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	120	30.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	48.823.000	1	48.823.000	1	48.823.000	1	48.823.000	1	48.823.000	1	48.823.0 00
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Per센	100	8.600.000	100	8.600.000	100	8.600.000	100	8.600.000	100	8.600.000	100	8.600.00 0
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	8.600.000	12	8.600.000	12	8.600.000	12	8.600.000	12	8.600.000	12	8.600.00 0

	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya kapasitas ASN</i>	<i>Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan</i>	Persen	100	2.500.000	100	2.500.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	2.500.000	5	2.500.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	5	0	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terpenuhinya layanan administrasi umum</i>	<i>Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum</i>	Persen	100	54.118.000	100	54.118.000	100	56.718.000	100	56.718.000	100	56.718.000	100	56.718.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.400.000	12	8.400.000	12	8.400.000	12	8.400.000	12	8.400.000	12	8.400.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	21.783.000	12	21.783.000	12	21.783.000	12	21.783.000	12	21.783.000	12	21.783.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	365	1.000.000	365	1.000.000	365	3.600.000	365	3.600.000	365	3.600.000	365	3.600.000

	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6.135.000	12	6.135.000	12	6.135.000	12	6.135.000	12	6.135.000	12	6.135.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	2.800.000	12	2.800.000	12	2.800.000	12	2.800.000	12	2.800.000	12	2.800.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	603.472.000	100	603.472.000	100	603.472.000	100	603.472.000	100	603.472.000	100	603.472.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	600.000	6	600.000	6	600.000	6	600.000	6	600.000	6	600.000

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	126.000.000	12	126.000.000	12	126.000.000	12	126.000.000	12	126.000.000	12	126.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.652.000	12	3.652.000	12	3.652.000	12	3.652.000	12	3.652.000	12	3.652.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	473.220.000	12	473.220.000	12	473.220.000	12	473.220.000	12	473.220.000	12	473.220.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Per센	100	280.046.000	100	280.046.000	100	505.546.000	100	505.546.000	100	505.546.000	100	505.546.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	51	255.546.000	51	255.546.000	51	255.546.000	51	255.546.000	51	255.546.000	51	255.546.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	19.500.000	35	19.500.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya pemanfaatan sarana pertanian	Persentase pemanfaatan sarana pertanian	Persen	81	848.056.000	82	858.543.000	83	901.470.000	84	946.544.000	85	993.871.000	85	1.043.564.000
	<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Meningkatnya penggunaan sarana pertanian sesuai ketentuan</i>	<i>Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai ketentuan</i>	Persen	39	80.052.000	40	182.341.000	41	591.123.000	42	636.197.000	43	636.197.000	44	685.890.000
			<i>Persentase benih padi yang diedarkan</i>	Persen	100		100		100		100		100		100	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	Laporan	1	137.022.000	1	155.862.000	1	155.862.000	1	200.936.000	1	200.936.000	1	250.629.000
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	23.082.000	1	26.479.000	1	26.479.000	1	26.479.000	1	26.479.000	1	26.479.000

	Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	0	0	0	60	408.782.00 0	60	408.782.00 0	60	408.782.00	60	408.782.000
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Termafaatkannya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tumbuhan	Persentase penggunaan bibit unggul	Per센	23,03	279.170.00 0	36	267.420.00 0	38	310.347.00 0	41	310.347.00 0	45	357.674.00 0	48	357.674.000
	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termafaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	279.170.00 0	2	267.420.00 0	2	310.347.00 0	2	310.347.00 0	2	357.674.00 0	2	357.674.000
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase benih yang diedarkan	Per센	100	408.782.00 0	100	408.782.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Laporan	1	408.782.00 0	1	408.782.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Optimalnya pemanfaatan luas lahan pertanian	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Diolah/ Dimanfaatkan	persen	99,99	15.678.435 .000	100	14.231.185 .000	100	2.142.744. 000	100	2.249.881. 000	100	2.362.376.0 00	100	2.480.49 4.000
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang difasilitasi pengembangannya	persen	100	746.774.00 0	100	569.019.00 0	100	242.927.00 0	100	242.927.00 0	100	90.254.000	100	90.254.0 00
			Persentase luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B	persen												
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	746.774.00 0	2	569.019.00 0	2	42.927.000	2	42.927.000	2	90.254.000	2	90.254.0 00
	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	200.000.00 0	0	0	0	0
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	0	0	0	0	1	200.000.00 0	0	0	0	0	0	0

	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	Persentase Jalan Usata Tani (JUT) sesuai standar	Persen	58	2.347.166.000	59	2.262.166.000	60	1.899.817.000	61	2.006.954.000	62	2.272.122.00	63	2.390.240.000
			Persentase pemenuhan standar RPH	Persen	73		73		73		73		73		73	
			Persentase luasan oncoran lahan pertanian	Persen	100		100		100		100		100		100	
			Persentase prasarana BPP sesuai standar	Persen	72,22		72,22		72,22		72,22		72,22		72,22	
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	14	1.765.650.000	15	1.580.650.000	15	1.178.405.000	15	1.178.405.000	15	1.378.405.00	15	1.378.405.000
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0

	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	3	518.831.00 0	4	618.831.00 0	4	658.727.00 0	4	765.864.00 0	4	831.032.00 0	4	949.150.000
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	62.685.000	1	62.685.000	1	62.685.000	1	62.685.000	1	62.685.000	1	62.685.000
	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi wilayah sumber bibit ternak	Percentase wilayah ternak yang difasilitasi	persen	100	12.584.495 .000	100	11.400.000 .000	100	0	100	0	100	0	100	0
	Sub Kegiatan Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	30	12.584.495 .000	30	11.400.000 .000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kejadian penyakit hewan dan meningkatnya higienitas Pangan Asal Hewan (PAH)	Percentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	Persen	86,38	141.381.00 0	86,80	141.381.00 0	87,21	148.450.00 0	87,61	155.873.00 0	88,03	163.666.00 0	90,9	171.849.000
			Prevalensi Penyakit Hewan (%)	Persen	16,95		16,85		16,75		16,65		16,55		16,45	

	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengobatan massal ternak	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM)	Persen	30	94.190.000	31	94.190.000	32	94.190.000	33	94.190.000	34	94.190.000	35	94.190.00
	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	1	94.190.000	1	94.190.000	1	94.190.000	1	94.190.000	1	94.190.000	1	94.190.00
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan jasa Medik Veteriner	Persentase Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai standar	Persen	78,5	26.703.000	79	26.703.000	79,5	26.703.000	80	34.126.000	80,5	41.919.000	81	50.102.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12	26.703.000	12	26.703.000	12	26.703.000	12	34.126.000	12	41.919.000	12	50.102.00
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pemantauan/pemeriksaan Pangan Asal Hewan (PAH)	Jumlah daging yang tidak ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Sampel	500	20.488.000	485	20.488.000	470	27.557.000	455	27.557.000	440	27.557.000	425	27.557.00

	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terwasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	20.488.000	12	20.488.000	12	27.557.000	12	27.557.000	12	27.557.000	12	27.557.00
5.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	Per센	10	211.851.000	10,2	288.451.000	10,49	302.874.000	10,69	318.017.000	10,98	333.918.000	11,19	350.614.000
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	Luas lahan pertanian yang mendapat fasilitasi penanggulangan bencana	Ha	1.220	211.851.000	1.245	288.451.000	1.280	302.874.000	1.305	318.017.000	1.340	333.918.000	1.365	350.614.000
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	760	88.341.000	785	88.341.000	810	102.764.000	835	117.907.000	860	133.808.000	885	150.504.000
	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	450	123.510.000	460	200.110.000	470	200.110.000	470	200.110.000	480	200.110.000	480	200.110.000

6.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kualitas kelompok tani	Persentase Kelompok Tani (Kategori Madya dan Utama) (%)	persen	22,17	2.695.547.000	22,67	2.715.728.000	23,17	2.851.514.000	23,67	2.994.090.000	24,17	3.143.795.00	24,67	3.300.984.000
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan kepada kelompok tani	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	Per센	100	2.695.547.000	100	2.715.728.000	100	2.851.514.000	100	2.994.090.000	100	3.143.795.00	100	3.300.984.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa=	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1749	7.594.000	1.749	24.865.000	1.749	160.651.000	1.749	303.227.000	1.749	452.932.000	1.749	610.121.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	42	2.324.379.000	42	2.319.379.000	42	2.319.379.000	42	2.319.379.000	42	2.319.379.00	42	2.319.379.000
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	18	363.574.000	18	363.574.000	18	363.574.000	18	363.574.000	18	363.574.000	18	363.574.000
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	0	0	2	7.910.000	2	7.910.000	2	7.910.000	2	7.910.000	2	7.910.000

Catatan : Program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan renja perangkat daerah tahun 2030.

4.2 Program Pendukung Prioritas

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	
			Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			<i>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			<i>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
			<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	
			Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	

			Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	

4.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Keterangan
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Target 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	PDRB Sektor Pertanian	Milyar Rupiah	8.105,637	8.661,756	8.935,654	9.491,773	9.765,671	10.321,790	
2.	Nilai Produksi Pertanian	Milyar Rupiah	7.974,46	8.525,74	8.792,46	9.344,34	9.616,24	10.168,43	
3.	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Angka	72,26	72,27	72,29	72,31	72,33	72,35	

4.4 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Keterangan
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Target 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Produktivitas Pertanian Per hektar per tahun	Ton/ha/tahun	738,44	742,14	745,85	749,58	753,32	757,09	
2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-4,65	-4,67	-4,69	-4,71	-4,73	-4,75	

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman, arahan, dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk lima tahun ke depan.

Strategi dan program-program prioritas yang dirumuskan diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan, keterbatasan infrastruktur, fluktuasi harga, dan dampak perubahan iklim, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada seperti permintaan pasar yang terus tumbuh dan perkembangan teknologi pertanian.

Pengendalian dan evaluasi dalam Renstra sangat penting untuk memastikan strategi dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pengendalian dengan fokus melacak pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya (anggaran, personel), dan menghasilkan output sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan pengumpulan data rutin (bulanan/triwulanan) mengenai realisasi kegiatan, anggaran yang terserap, dan indikator kinerja kunci dengan tujuan untuk mendekripsi penyimpangan atau masalah sejak dulu, memastikan kegiatan berada di jalur yang benar, dan melakukan tindakan korektif cepat yang disajikan dalam laporan rutin bulanan dan triwulan

Evaluasi berfungsi untuk menilai kinerja secara keseluruhan (efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak) terhadap pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Melakukan analisis mendalam, biasanya dilakukan secara berkala (tahunan atau akhir periode Renstra) untuk membandingkan capaian hasil (outcome) dan dampak (impact) dengan target Renstra dengan menilai keberhasilan program, mengidentifikasi faktor penghambat/pendorong, dan memberikan masukan perbaikan untuk Renstra periode berikutnya atau penyesuaian strategi saat ini.

Manfaat dalam pengendalian dan evaluasi Renstra mencakup :

- Akuntabilitas yaitu menyediakan bukti mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan capaian kinerja kepada pemangku kepentingan (publik, pimpinan, dan pemerintah).
- Pembelajaran dan perbaikan yaitu dasar untuk belajar dari pengalaman (apa yang berhasil dan tidak) guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan di masa mendatang.

- Pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang valid dan tepat waktu kepada pimpinan untuk mengambil keputusan strategis, seperti realokasi sumber daya atau penyesuaian program.
- Transparansi yaitu meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaporan capaian yang jelas dan terukur.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian semata, tetapi memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pihak. Hanya dengan kerja sama yang solid, seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian Purbalingga.

Kami meyakini bahwa dengan komitmen bersama, semangat gotong royong, dan kerja keras, Visi pembangunan pertanian Kabupaten Purbalingga dapat diwujudkan demi terciptanya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

REVON HAPRINDIAT, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 197310051993031005